

**PEMAHAMAN GENERASI KEDUA DARI KELUARGA
PERNIKAHAN ANTAR NEGARA (INDONESIA-TAIWAN)
TERHADAP BUDAYA IBU SETELAH PENGIMPLEMENTASIAN
KEBIJAKAN NSP**

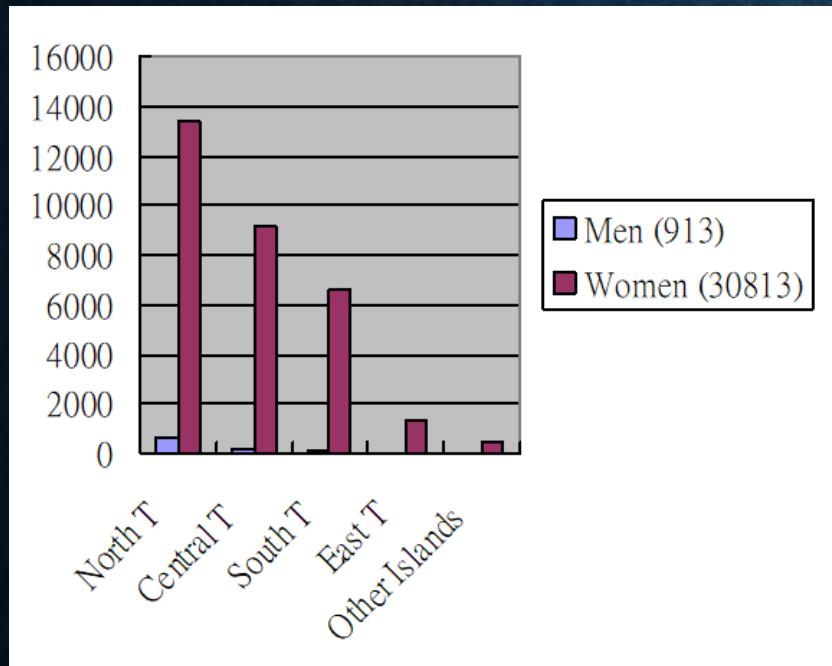
Yufita Ng, Assistant Professor
Wenzao Ursuline University of Languages

Topik Penelitian:

Bagaimana generasi kedua pernikahan antar negara Taiwan-Indonesia memahami kampung halaman ibu mereka, pengakuan identitas mereka, dan pendapat mereka tentang kebijakan NSP Taiwan?

Metode penelitian:
Kualitatif dan Observasi

PERKAWINAN ANTAR NEGARA INDONESIA-TAIWAN



Graph 1. Amount of Indonesians-Taiwanese intermarriage couples in Taiwan, Januari, 1987-August, 2023

Sebagian besar perkawinan campuran antara laki-laki Taiwan dengan perempuan di negara-negara Asia Tenggara terjadi melalui perjodohan atau melalui layanan agen perkawinan yang memicu beberapa masalah.

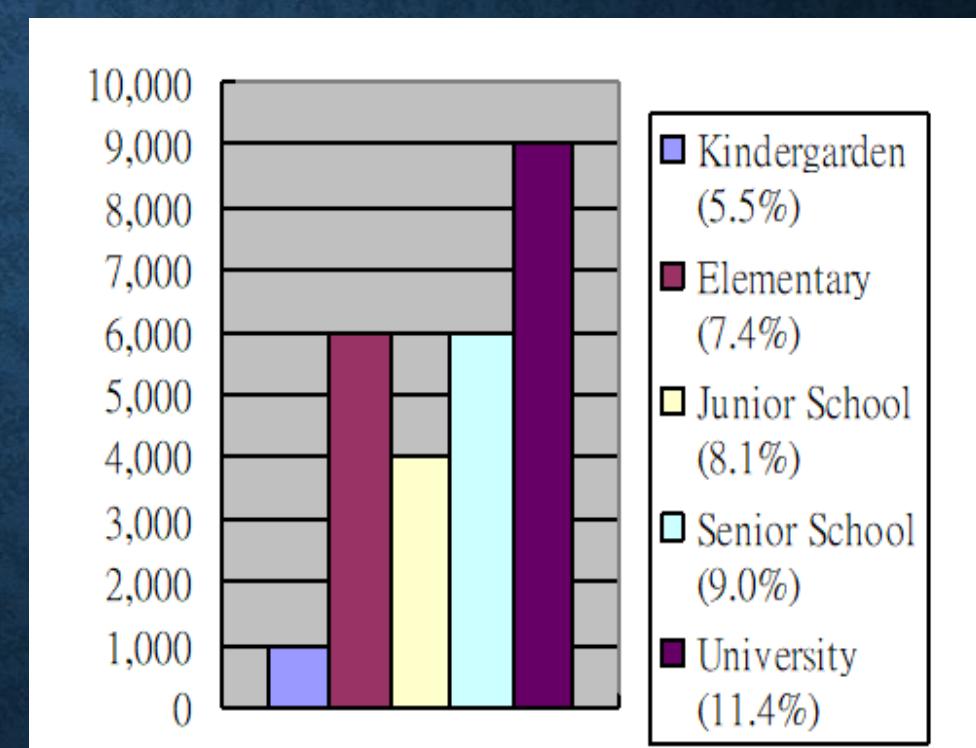
- Masyarakat Taiwan menganggap pasangan perempuan adalah istri yang mereka beli sehingga keluarga suami merasa mempunyai kekuasaan terhadap anggota baru keluarga tersebut (Sheu, 2007). Stigma yang tumbuh di masyarakat Taiwan bahwa generasi kedua dilahirkan dengan kekurangan karena penampilan fisik dan memiliki pengalaman budaya yang berbeda dibandingkan dengan anak yang lahir dari orang tua Taiwan pada umumnya.

Persepsi negara-negara Asia Tenggara terbelakang mempengaruhi posisi penduduk baru di tingkat bawah dalam masyarakat Taiwan dan disertai dengan eksklusivitas keluarga angkat terhadap budaya anggota keluarga baru sehingga menimbulkan stereotip tertentu (Asuncion & Shinozaki, 2017).

- Adanya ketimpangan status dalam keluarga dan budaya eksklusivitas memicu anak-anak generasi kedua tumbuh hanya belajar dan mengamalkan monokultural, bukan multikultural maupun kognisi terhadap budaya ibunya.

PENDAHULUAN

New Southbound Policy (NSP) merupakan kebijakan Luar Negeri yang diluncurkan oleh Presiden Taiwan Tsai Ing-Wen pada tahun 2016. Tujuan utama dari kebijakan tersebut adalah untuk memperkuat hubungan Taiwan dengan negara-negara yang terletak di selatan Taiwan, termasuk kawasan Asia Tenggara, seperti Indonesia, Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, Vietnam, Kamboja, Myanmar, Laos, dan Brunei.



Graph 2. Amount of Indonesians-Taiwanese
Intermarriage Students in Taiwan

TAIWAN NEW SOUTHBOUND POLICY

- Prinsip NSP adalah membangun hubungan berkesinambungan dan berjangka panjang, menciptakan pembangunan yang beragam.
- Menjalin kolaborasi yang saling menguntungkan antara kawasan Taiwan dengan Asia Tenggara dan Asia Selatan.
- Konsep inti kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mengintegrasikan sumber daya dan kekuatan di berbagai kementerian, pemerintah daerah, serta perusahaan dan kelompok swasta dari Taiwan dan negara sasaran NSP.
- NSP dilaksanakan berdasarkan empat pilar yaitu
 - kerjasama ekonomi dan perdagangan,
 - pertukaran antar masyarakat (P2P exchanges)
 - Menciptakan model kerjasama baru yang saling menguntungkan
 - Membangun “kesadaran masyarakat ekonomi” dengan Negara-negara Selatan Taiwan.



<https://topics.amcham.com.tw/2021/12/new-southbound-policy-prospects-2022/>



PEOPLE TO PEOPLE EXCHANGES

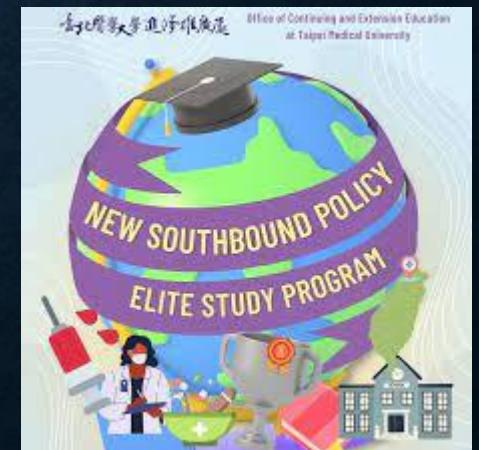
- Poin inti P2P:
 - Menekankan pada pendalaman pertukaran dan pembinaan cendekiawan muda
 - Pertukaran pelajaran tenaga kerja industri secara bilateral
 - Saling melengkapi dan berbagi sumber daya manusia.
 - Program:
 - Pendidikan
 - beasiswa
 - kelas khusus untuk kerja sama industri-universitas
 - kelas pelatihan teknis untuk pemuda asing
 - kelas pelatihan kelas
 - kesempatan kerja
 - Tenaga kerja industri
 - Pemberdayaan penduduk baru
 - Membantu penduduk baru memanfaatkan bahasa dan budaya mereka untuk memperoleh sertifikat dan pekerjaan yang relevan .
- Penyediaan pelajaran bahasa-bahasa negara Asia Tenggara:

 - SD-SMP: Kurikulum-bahasa ibu
 - SMA: pelajaran ekstrakurikuler
 - PT: Jurusan Penelitian Asia Tenggara (Bahasa sebagai mata kuliah wajib)

LITERATUR

- M. Calderone terkait mahasiswa imigran menunjukkan bahwa mahasiswa imigran yang budaya asalnya diakui, nilai prestasinya mengungguli mereka yang budaya asalnya tidak mendapat pengakuan (Liliweri, 2018)
- Anisa N & Goforth: Penolakan terhadap imigran dan pembatasan praktik membuat generasi kedua kehilangan kesempatan untuk merasakan hidup dalam komunitas multicultural sehingga mempengaruhi kesejahteraan psikologis ibu dan anak.
- Perempuan Asia Tenggara memiliki perbedaan dari segi fisik, serta latar belakang budaya dan adat istiadat yang sangat berbeda dengan masyarakat Taiwan pada dan perbedaan tersebut dapat membuat terkikisnya budaya unggul lokal (Cheng, 2014).
- Isabelle Cheng dalam penelitiannya tentang ibu imigran di Taiwan merangkum beberapa cara yang dilakukan masyarakat dan pemerintah Taiwan untuk mengubah perempuan imigran Asia Tenggara menjadi ibu yang cakap dengan disiplin sosial dan mekanisme regulasi pemerintah karena dianggap belum atau belum memenuhi syarat untuk menjadi ibu orang Taiwan (Cheng, 2014).
- Dari sudut pandang penduduk terhadap pasangan di Asia Tenggara, kemampuan mereka dalam bidang bahasa, ekonomi, dan keterampilan berbahasa dianggap belum memenuhi persyaratan integrasi (Charsley K., Bolognina M., dan Spencer S., 2017), dan dianggap dapat mengancam perekonomian negara. keamanan dan kemajuan pembangunan masyarakat tuan rumah (Brenda S. A. Yeoh, Sheng Leng Cshee, Rohini Anant, dan Theodora Lam, 2021).

- Kehadiran NSP membawa peluang bagi penduduk baru dan generasi kedua secara ekonomi dan sosial kultur
- Dalam konteks NSP, kebijakan people to people dalam NSP merupakan bagian dari kepentingan Taiwan dengan negara-negara Asia Tenggara ini. Sehingga dapat membentuk hubungan yang berkesinambungan dan pencapaian target yang maksimal dengan memaksimalkan asset yang ada. Through their cultural learning, they are expected to become a bridge that connects Taiwan and Southeast Asia, terutama dalam bahasa sebagai alat komunikasi dapat meningkatkan nilainya dan sesuai konteks people to people dalam NSP (I-Chen Huang, 2021).



NSP DAN PENGAKUAN IDENTITAS GENRASI KEDUA TAIWAN

- Pengetahuan tentang budaya ibu
 - Sekolah
 - Media massa
 - Pengalama pribadi
 - Cerita ibu
- Pandangan generasi kedua terhadap NSP dan pengakuan identitas
 - Indonesia adalah kampung halaman kedua

Tantangan:

Keterbatasan Bahasa

Di antara akrab dan asing

Sisi Positif:

Meningkatkan hubungan Indonesia-Taiwan

Kesempatan kerja

Kesempatan mengenal kampung halaman ibu mereka

KESIMPULAN

- Teori implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa NSP sebagai salah satu kebijakan Luar Negeri penting pemerintahan Presiden Tsai-Ing Wen turut memberi pengaruh dalam ruang domestik.
 - hubungan luar negeri Taiwan dan Indonesia .
 - memberi jaminan dan penguatan identitas bagi orang Indonesia yang menetap di Taiwan dengan status apapun.
- Responden berharap NSP berfokus pada pengetahuan tentang pembangunan Indonesia dan dampak positif yang dapat meningkatkan hubungan kedua entitas. Inisiasi NSP merupakan contoh pengakuan pemerintah Taiwan terhadap kawasan Asia Tenggara, serta meningkatnya kepercayaan diri pada keluarga pernikahan antar negara
- NSP meningkatkan Visibilitas budaya Asia Tenggara di Taiwan, khususnya budaya Indonesia, serta meningkatkan saluran komunikasi bagi kedua belah pihak.
- Pemerintah Taiwan seharusnya lebih memanfaatkan kelebihan struktur soscil dalam negerinya untuk membangun hubungan dalam socio-ekonomi dan diplomasi yang saling menguntungkan dan berkelanjutan dengan negara Asia Tenggara dengan Taiwan lebih memberdayakan potensi generasi kedua sebagai jembatan hubungan People to People di masa mendatang. Sehingga NSP ini dapat menjadi investasi jangka panjang Taiwan.

METODE PENELTIAN

kualitatif dan observasi

REFERENSI

- AloweriLili. (2018). *Prasangka, Konflik dan Komunikasi Antarbudaya*. Jakarta, Indonesia: Prenadamedia Group.
- Asuncion Fresnozo-Fot and Kyoko Shinozaki. (2017). A transnational perspective on intersecting experiences: gender, social class and generation among Southeast Asian migrants and their families. *Journal of Ethnic and Migrants Studies*, 頁 867-884.
- Brenda S. A. Yeoh, Heng Leng Chee, Rohini Anant, and Theodora Lam. (2021). Transnational Marriage Migration and the Negotiation of Precarious Pathways Beyond Partial Citizenship in Singapore. *Citizenship Studies*, 898-917.
- Cheng, I. (2013). Making foreign women the mother of our nation: the exclusion and assimilation of immigrant women in Taiwan. *Asian Ethnicity*, 157-179.
- Dan Rodríguez-García, Miguel Solana, Anna Ortiz & Beatriz Ballestín. (2019). Blurring of colour lines? Ethnoracially mixed youth in Spain navigating identity. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 838-856.
- Douglass Mike. (2006). Global Householding in Pacific Asia. *International Development Planning Review*, 421-466.
- FriedmanSara. (2010). Marital Immigration and Graduated Citizenship: Post Naturalization Restrictions on Mainland Chinese Spouses in Taiwan. *Pacific Affairs*, 73-93.
- Haruna Kasai and Tzu-Bin Lin. (2023). Language education as a site for identity negotiation: The practice of new immigrant language instruction in Taiwan. *Cogent Education*, 1-12.
- Hammersley Martyn. (2013). *What is Qualitative Research* (G. Crow Ed). London: Bloomsbury Publishing.
- Janet Buttolph Johnson, R. A. J., H.T. Reynolds. (1950). *Political Science Research Methods* (4th ed.). Washington D. C.: CQ Press.
- Katharine Charsley, Marta Bolognina, and Sarah Spencer. (2017). Marriage Migration and Intergration: Interrogating Assumptions in Academic and Policy Debates. *Ethnicities*, 469-490.
- NgYufita. (2020). Taiwan New Resident's Culture and Languages Education Development Under New Southbound Policy. *Journal of Policy and Bureaucracy Management*, 56-75.
- SheuH.Y. (2007). Full Responsibility with Partial Citizenship: Immigrant Wives in Taiwan. *Social Policy Administration*, 179-196.
- SingerR.Marshall. (1998). *Perception and Identity in Intercultural Communication*. Philadelphia: Intercultural Press.

TERIMA KASIH